



Pemerintah
Kota Probolinggo



RENCANA KERJA (RENJA)

Perubahan Tahun 2022



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PROBOLINGGO**

Jl. Mastrip 155 Kota Probolinggo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB IV	PENUTUP	37

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) P - APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 sebagai sebuah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo serta berpedoman pada RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024. Penyusunan Dokumen RENJA P-APBD 2022 ini juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas dari pusat dan propinsi yang tercantum di RENJA Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, RENJA Kementerian Perindustrian, RENJA Kementerian Perdagangan, RENJA Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur, RENJA Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Timur serta RENJA Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Timur.

Dokumen RENJA P-APBD ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan RENJA P-APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang memuat maksud, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dokumen RENJA P-APBD ini sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Kerja P-APBD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan PD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005–2025.
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun 2022;
28. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;
29. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian
30. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 192 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.
31. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun Tujuan penetapan RENJA P-APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo ;
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja P-APBD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2019 S/D TAHUN 2024 (PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPd TAHUN LALU (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022			KET
						TARGET	REALISASI S/D TRIWULAN II	TINGKAT REALISASI	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	82	%	81	81	41	50,62	
2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	82	%	81	81	41	50,62	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	6	2	1	50,00	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	Laporan	2	1	1	100,00	
2.17.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	70	%	70	71	36	50,70	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	100	%	100	25	50	200,00	
2.17.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75	%	75	75	37,5	50,00	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	2	Laporan	2	12	6	50,00	
2.17.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	80	%	80	80	40	50,00	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80	%	80	80	40	50,00	
2.17.01.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	80	%	80	80	42,5	53,13	
2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	2	2	1	50,00	
2.17.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	85	%	80	80	42,5	53,13	
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85	%	80	80	42,5	53,13	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	%	80	80	42,5	53,13	
2.17.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	80	%	80	80	40,0	50,00	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	%	90	90	45	50,00	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	%	90	90	40	44,44	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	%	80	80	40	50,00	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	85	%	85	85	42,5	50,00	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	80	%	80	80	40	50,00	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	80	%	80	80	40	50,00	
2.17.01.2.07.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	85	%	85	85	40	47,06	
2.17.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85	%	85	85	40	47,06	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90	%	85	85	42,5	50,00	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85	%	85	85	42,5	50,00	
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	80	%	80	80	45	56,25	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80	%	80	80	42,5	53,13	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80	%	80	80	40	50,00	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Presentase Mebel yang Dipelihara	80	%	80	80	40	50,00	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	%	90	85	42,5	50,00	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	85	%	85	90	45	50,00	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	85	%	85	85	43	50,00	
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	1	%	164	164	5	3,05	
2.17.02.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki Perangkat Organisasi Koperasi yang sesuai dengan SOP dan SOM	165	Koperasi	164	164	82	50,00	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	54	Koperasi	50	50	25	50,00	

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	1	%	94	92	5	5,43	
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	94	Koperasi	92	92	25	27,17	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	54	Koperasi	52	52	25	48,08	
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapatkan Fasilitas Diklat Perkoperasian	50	%	164	164	26	15,85	
2.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	165	Orang	164	164	50	30,49	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	28	Orang	28	28	50	178,57	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mandiri	0,25	%	28	28	12,5	44,64	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha	28	Koperasi	28	28	14	50,00	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	28	Orang	28	28	14	50,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha	1,92	%	15	15	0,96	6,40	
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dan kelembagaan usaha	100	PUM	100	100	50	50,00	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1	Dokumen	1	1	1	100,00	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	79	PUM	79	79	175	221,52	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	PUM	100	100	50	50,00	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3	Kali	2	6	1	16,67	
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	0,78	%	15	15	0,39	2,60	
2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	150	PUM	100	150	87,5	58,33	

2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150	PUM	100	150	87,5	58,33	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	77	%	77	75	38,5	51,33	
3.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	1	%	80	75	40,0	53,33	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	%	100	70	50	71,43	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali	80	%	80	80	41	51,25	
3.30.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pasar yang terstandarisasi (Bersih, Tertib, Aman sesuai standart)	80	%	80	75	40	53,33	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Pelayanan Pasar yang baik	80	%	80	100	6	6,00	
3.30.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pasar yang baik	28	%	28	100	40	40,00	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	6	6	6	100,00	
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	1	%	1	80	0,5	0,63	
3.30.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang	5	Pelaku Usaha Ekspor	5	5	12,5	250,00	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30	Pelaku Usaha Ekspor	30	30	12,5	41,67	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTP yang memenuhi standar secara metrologi legal	80	%	80	80	6,8	8,50	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTPP	500	Pelaku Usaha	100	100	250	250,00	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1500	Unit	100	100	750	750,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	80	%	80	80	80	100,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah RPIK dan RAPERDA	1	Dokumen	1	80	1	1,25	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	2	Dokumen	1	1	1	100,00	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	100	IKM	100	100	50	50,00	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	30	30 IKM	30	30	15	50,00	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	30	30 IKM	30	30	15	50,00	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	1	Laporan	1	1	1	100,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase ijin usaha industri yang difasilitasi	80	%	20	80	10	12,50	
3.31.03.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri yang mematuhi ijin usaha industri	80	%	20	80	10	12,50	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha industri (IUI) yang diajukan	40	%	40	80	20	25,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	80	%	32	85	16	18,82	
3.31.04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri	80	%	32	50	16	32,00	

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

3.31.04.2.01.01	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	80	%	32	50	16	32,00	
-----------------	--	---	----	---	----	----	----	--------------	--

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022 Kota Probolinggo diatas, ada beberapa realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Adanya beberapa regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, diantaranya; Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggaran 2022 dan DBHCHT Tahun Anggaran 2022;
2. Banyaknya Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV antara lain : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam dan Program Pengembangan Ekspor, sehingga capaian kinerja per indikator pada program secara keseluruhan baru bisa dihitung pada triwulan IV.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2022 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2022, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun

2.3 Isu - Isu penting dan arah kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Urusan Koperasi dan UKM

Belum optimalnya pengelolaan usaha koperasi, dan stabilitas iklim investasi daerah

Arah Kebijakan Pembangunan :

1. Pengoptimalan Sistem OSS (Online Single Submission) dalam mendukung kemudahan pelayanan perijinan;
2. Percepatan Peningkatan Daya Tarik Investasi melalui Promosi dan Pemetaan Potensi Investasi;
3. Penjagaan iklim investasi daerah;
4. Peningkatan kualitas koperasi melalui penguatan kelembagaan dan izin usaha koperasi.

Urusan Perdagangan

Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan dan daya tarik wisata sebagai potensi ekonomi daerah

1. Peningkatan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan sesuai standar guna menjamin stabilitas harga
2. Pengembangan kapasitas SDM Pelaku Usaha dalam mendukung peningkatan nilai ekspor daerah

Urusan Perindustrian

Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan dan daya tarik wisata sebagai potensi ekonomi daerah

1. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah
2. Peningkatan Standarisasi kualitas mutu hasil dan hasil olahan produk

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo didasarkan pada Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019 - 2024 yaitu:

“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”

Pada cascading (pohon kinerja) RPJMD Kota Probolinggo 2019 – 2024 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berada pada Misi I dan Misi II yaitu:

MISI 1 : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

Dalam rangka mendukung Misi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 Kota Probolinggo maka ditetapkan tujuan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo beserta sasaran strategisnya sebagai berikut:

3.1 Penyesuaian Target tujuan / sasaran Perubahan Renja 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Satuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja	
					Renja 2022	Renja P-APBD 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing		%	Pertumbuhan Ekonomi	3-3,5	3-3,5
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	%	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6,1	6,1
		Meningkatnya Sektor Perdagangan	%	Persentase Pertumbuhan PDRB	2,1	2,1

		dan Industri		Perdagangan		
			%	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	2,1	2,1

Dengan memperhatikan target capaian kinerja serta hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sampai dengan triwulan II dan pertimbangan yang tidak sesuai dengan asumsi – asumsi, maka perlu dilakukan penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi pada Perubahan APBD Tahun 2022 dengan rincian pendanaan sebagai berikut:

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Probolinggo

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022							CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA P-APBD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN	JUMLAH	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					24.136.433.332	1.868.169.824	26.004.603.156				
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					11.000.221.859	618.169.824	11.618.391.683				
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Kota Probolinggo	82%	82%	9.219.511.359	88.169.824	9.307.681.183	DAU		82%	8.635.597.745
	2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Probolinggo	82%	82%	147.310.000	-	147.310.000	DAU		82%	110.500.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	2 Dokumen	2 Dokumen	121.110.000	-	121.110.000	DAU	2 dok	95.000.000
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Probolinggo	2 Laporan	2 Laporan	26.200.000	-	26.200.000	DAU	1 dok	15.500.000
2.17.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	72%	72%	7.957.719.105	61.669.824	8.019.388.929	DAU	72%	7.189.911.687
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Kota Probolinggo	100 persen	100 persen	7.649.719.205	41.669.824	7.691.389.029	DAU	100%	6.813.472.790
2.17.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	75%	75%	269.200.000	20.000.000	289.200.000	DAU	75%	288.430.997
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	Kota Probolinggo	12 Laporan	12 Laporan	38.799.900	-	38.799.900	DAU	12 laporan	36.867.900
2.17.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	80%	80%	22.064.000	-	22.064.000	DAU	2 laporan	25.570.000
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	80%	80%	22.064.000	-	22.064.000	DAU	12 laporan	25.570.000
2.17.01.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	80%	80%	14.999.800	-	14.999.800	DAU	80%	13.928.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Probolinggo	2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.800	-	14.999.800	DAU		80%	13.928.000
2.17.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	85%	85%	21.464.000	7.500.000	28.964.000	DAU		80%	30.222.000
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	85%	85%	16.464.000	7.500.000	23.964.000	DAU		2 laporan	28.070.000
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Probolinggo	80%	80%	5.000.000	-	5.000.000	DAU		85%	2.152.000
2.17.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	80%	80%	320.307.354	13.734.197	334.041.551	DAU		85%	542.618.000
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	90%	90%	48.622.104	(5.155.000)	43.467.104	DAU		80%	31.570.600
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Probolinggo	80%	80%	10.232.200	-	10.232.200	DAU		80%	6.935.400
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	80%	80%	47.839.050	1.200.000	49.039.050	DAU		90%	47.980.500
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	85%	85%	85.079.100	-	85.079.100	DAU		80%	80.625.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	Kota Probolinggo	80%	80%	22.509.900	2.500.000	25.009.900	DAU	80%	28.342.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Kota Probolinggo	80%	80%	106.025.000	15.189.197	121.214.197	DAU	85%	347.164.500
2.17.01.2.07.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Kota Probolinggo	80%	80%	572.793.000	(4.734.197)	568.058.803	DAU	80%	643.816.000
2.17.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	80%	80%	25.824.000	-	25.824.000	DAU	80%	30.010.000
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolinggo	85%	85%	112.100.000	19.500.003	131.600.003	DAU	80%	136.685.000
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	85%	85%	434.869.000	(24.234.200)	410.634.800	DAU	80%	477.121.000
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Kota Probolinggo	90%	90%	162.854.100	10.000.000	172.854.100	DAU	85%	118.172.058
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	85%	85%	44.448.000	2.000.000	46.448.000	DAU	85%	43.542.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	80%	80%	51.406.100	-	51.406.100	DAU	90%	44.560.100
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Presentase Mebel yang Dipelihara	Kota Probolinggo	80%	80%	2.000.000	-	2.000.000	DAU	85%	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolinggo	85%	85%	10.000.000	16.000.000	26.000.000	DAU	80%	15.000.000
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Probolinggo	90%	90%	35.000.000	-	35.000.000	DAU	85%	15.069.958
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Probolinggo	85%	85%	20.000.000	(8.000.000)	12.000.000	DAU	90%	12.000.000
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Kota Probolinggo	1%	1%	147.079.000	50.000.000	197.079.000	DAU	10%	383.000.000
2.17.02.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki Perangkat Organisasi Koperasi yang sesuai dengan SOP dan SOM	Kota Probolinggo	165 Orang	165 Orang	147.079.000	50.000.000	197.079.000	DAU	100 Unit Usaha	383.000.000,00

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	147.079.000	50.000.000	197.079.000	DAU		50 Unit Usaha	255.000.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Kota Probolinggo	1%	1%	48.360.000	-	48.360.000	DAU		10%	
2.17.03.2.01.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Kota Probolinggo	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	48.360.000	-	48.360.000	DAU		50 Unit Usaha	64.000.000,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	48.360.000	-	48.360.000	DAU		50 Unit Usaha	64.000.000
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapatkan Fasilitas Diklat Perkoperasian	Kota Probolinggo	50%	50%	404.200.000	-	404.200.000	DAK NON FISIK		52%	1.000.000
2.17.05.2.01.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kota Probolinggo	100 Orang	100 Orang	404.200.000	-	404.200.000	DAU		100 Orang	1.000.000,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Probolinggo	100 Orang	100 Orang	404.200.000	-	404.200.000	DAU		100 Orang	1.000.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mandiri	Kota Probolinggo	0,25%	0,25%	114.594.000	-	114.594.000	DAU		25%	100.000.000
2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha	Kota Probolinggo	28 koperasi dan UMKM	28 koperasi dan UMKM	114.594.000	-	114.594.000	DAU		30 Koperasi & UKM	100.000.000,00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kota Probolinggo	28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	114.594.000	-	114.594.000	DAU		30 Koperasi & UKM	100.000.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha	Kota Probolinggo	1,92%	1,92%	945.687.000	235.000.000	1.180.687.000	DAU, DID		2,34%	2.248.050.000
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dan kelembagaan usaha	Kota Probolinggo	100 PUM	100 PUM	945.687.000	235.000.000	1.180.687.000	DAU		100 PUM	2.248.050.000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Probolinggo	1 Dokumen	1 Dokumen	55.504.000	-	55.504.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Probolinggo	350 PUM	350 PUM	855.183.000	235.000.000	1.090.183.000	DAU, DID		3 Kali	1.308.050.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Probolinggo	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	15.000.000	-	15.000.000	DAU		100 PUM	920.000.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Probolinggo	2 Kali	2 Kali	20.000.000	-	20.000.000	DAU	350 PUM	10.000.000
	2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	Kota Probolinggo	0,78%	0,78%	120.790.500	245.000.000	365.790.500	DAU, DID	0,91%	435.000.000
	2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan tehnologi	Kota Probolinggo	175 PUM	175 PUM	120.790.500	245.000.000	365.790.500	DAU, DID	175 PUM	435.000.000,00
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Probolinggo	175 Unit Usaha	175 Unit Usaha	120.790.500	245.000.000	365.790.500	DAU, DID	175 PUM	435.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			Kota Probolinggo			9.105.103.273	1.250.000.000	10.355.103.273	DAU, DID, DAK FISIK	77%	
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	Kota Probolinggo	75%	75%	6.868.756.148	1.200.000.000	8.068.756.148	DAU, DID, DAK FISIK	80%	227.000.000
	3.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	75%	75%	6.868.756.148	1.200.000.000	8.068.756.148	DAU, DID, DAK FISIK	100 Unit	227.000.000
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Probolinggo	100 Unit	107 Unit	6.868.756.148	1.200.000.000	8.068.756.148	DAU, DID, DAK FISIK	2 Dokumen	227.000.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali	Kota Probolinggo	80%	80%	1.878.606.625	50.000.000	1.928.606.625	DAU	80%	1.651.649.174
3.30.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pasar yang terstandarisasi (Bersih, Tertib, Aman sesuai standart)	Kota Probolinggo	80%	80%	1.684.367.625	50.000.000	1.734.367.625	DAU, DID	82%	1.651.649.174
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Probolinggo	12 Laporan	12 Laporan	1.684.367.625	50.000.000	1.734.367.625	DAU	80%	1.651.649.174
3.30.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Kota Probolinggo	80%	80%	194.239.000	-	194.239.000	DAU	12 Laporan	144.430.000
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	12 Laporan	12 Laporan	194.239.000	-	194.239.000	DAU	80%	144.430.000
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Kota Probolinggo	1%	1%	66.464.000	-	66.464.000	DAU	12 Laporan	70.000.000
3.30.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang	Kota Probolinggo	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	66.464.000	-	66.464.000	DAU	1%	70.000.000
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kota Probolinggo	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	66.464.000	-	66.464.000	DAU	25 Pelaku usaha	70.000.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang memenuhi standar secara metrologi legal	Kota Probolinggo	80%	80%	291.276.500	-	291.276.500	DAU	25 Pelaku usaha	268.000.000
3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP	Kota Probolinggo	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	291.276.500	-	291.276.500	DAU	85%	268.000.000,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Probolinggo	1500 Unit	1500 Unit	291.276.500	-	291.276.500	DAU	500	268.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		Kota Probolinggo			4.031.108.200	-	4.031.108.200	DAU, DAK FISIK DAN NON FISIK	1500	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	Kota Probolinggo	80%	80%	3.970.632.300	-	3.970.632.300	DAU	1 Dokumen	319.269.700
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah RPIK dan RAPERDA	Kota Probolinggo	1 Dokumen	1 Dokumen	3.970.632.300	-	3.970.632.300	DAU	1 Dokumen	319.269.700
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	Kota Probolinggo	2 Dokumen	2 Dokumen	194.641.800	-	194.641.800	DAU	1 Dokumen	35.000.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	Kota Probolinggo	100 IKM	100 IKM	58.525.800	-	58.525.800	DAU	1 Dokumen	106.384.000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri	Kota Probolinggo	30 IKM	30 IKM	125.999.800	-	125.999.800	DAU	1 Dokumen	175.385.700
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri	Kota Probolinggo	30 IKM	30 IKM	3.589.465.000	-	3.589.465.000	DAU	1 Dokumen	1.000.000

Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan

3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	1 Laporan	1 Laporan	1.999.900	-	1.999.900	DAU		1 Dokumen	1.500.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase ijin usaha industri yang difasilitasi	Kota Probolinggo	80%	80%	21.026.000	-	21.026.000	DAU		15%	10.000.000
3.31.03.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri yang mematuhi ijin usaha industri	Kota Probolinggo	80%	80%	21.026.000	-	21.026.000	DAU		20%	10.000.000
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha industri (IUI) yang diajukan	Kota Probolinggo	80%	80%	21.026.000	-	21.026.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Kota Probolinggo	80%	80%	39.449.900	-	39.449.900	DAU		32%	35.730.300
3.31.04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri	Kota Probolinggo	80%	80%	39.449.900	-	39.449.900	DAU		32%	35.730.300
3.31.04.2.01.01	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pelaku industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri	Kota Probolinggo	80%	80%	39.449.900	-	39.449.900	DAU		1 Dokumen	35.730.300

Di dalam penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo ini, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo ini dilakukan karena adanya penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo ini merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Probolinggo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.

Dengan adanya Perubahan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.